KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Separuh Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan
Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Separuh Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR menurun drastis pada tahun 2021. Hingga saat ini, baru 55% anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengimbau kepada setengah atau tepatnya 45% anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaan untuk segera memenuhi kewajibannya. Para anggota DPR diminta jujur dan transparan dalam melaporkan harta kekayaannya.

"Kami mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan kekayaan agar segera memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap," kata Ipi, melalui pesan singkatnya, Kamis (19/8).

Ipi menekankan pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. LHKPN juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Undang-Undang mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," tandasnya.

Para anggota DPR dapat menyetorkan LHKPN melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id. Bagi yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui *e-mail* dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat lhkpn, kolom aksi dan tombol *download* tanda terima.

Diketahui sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN anggota DPR untuk semester I tahun 2021 menurun drastis. Hanya sekitar 55% anggota DPR yang baru melaporkan harta kekayaannya.

"Legislatif dulu itu 100% DPR dan DPRD. Karena, KPU mensyaratkan kalau mau maju, legislatif harus isi LHKPN menjadi 100%. Sekarang, yang DPR jatuh tinggal 55%, yang DPRD tinggal 90%. Kalau sudah *masukin*, setiap tahun harus *masukin* lagi *ya*," ujar Pahala, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/8).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan pihaknya akan mengingatkan seluruh fraksi di DPR agar memastikan seluruh anggotanya sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sufmi Dasco menyebutkan dampak dari pandemi Covid-19 banyak anggota yang tidak fokus karena menangani berbagai hal terkait pandemi. "Itu nanti kita ceklagi. Karena, di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini banyak kegiatan sehingga tidak fokus," ujar Sufmi, di Lobi Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta Pusat, Kamis (19/8).

Dasco menegaskan pihaknya akan memberikan pengumuman kepada seluruh anggota agar bisa segera melaporkan kewajibannya tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik. "Nanti kami akan ingatkan kepada kawan-kawan. Yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan LHKPN-nya," katanya.

ariedwie satrio/ carlos roy fajarta